

PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT PEDESAAN
(Studi Perilaku Memilih Masyarakat Nagari Koto Laweh Kecamatan
Lembang Jaya Kabupaten Solok Pada Pemilihan Wali Nagari Koto Laweh
Tahun 2007)

SKRIPSI

Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Candra Januardi
04193026



JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

ABSTRAK

Candra Januardi , 04193026, skripsi dengan judul *Perilaku Memilih Masyarakat Pedesaan (Studi perilaku memilih masyarakat nagari Koto Laweh kecamatan Lembang Jaya kabupaten Solok pada pemilihan wali nagari)*. Sebagai Pembimbing I Drs. Bakaruddin Rosyidi, MS dan Pembimbing II Andri Rusta, S.IP. Skripsi ini terdiri dari 108 halaman dengan 10 referensi buku, 10 skripsi, 1 Peraturan Daerah, 2 data rekapitulasi, 2 perundang-undangan dan 1 situs internet.

Berbagai perubahan situasi politik sebagai konsekuensi dari tuntutan demokratisasi tentunya akan berpengaruh pada pemerintahan di tingkat lokal. Berbagai proses demokratisasi mulai tampak dalam kehidupan politik sebagai akibat berbagai perubahan dalam sistem pemilihan umum dan adanya prinsip otonomi daerah akan memberikan warna baru dalam pola rekrutmen pemilihan wali nagari di propinsi Sumatera Barat. Hal ini adalah sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik dengan cara ikut mencoblos pada Pemilihan wali nagari tersebut. Penelitian ini mengkaji mengenai perilaku memilih masyarakat nagari Koto Laweh, kecamatan Lembang Jaya, kabupaten Solok, di mana pada nagari ini penggunaan hak pilih masyarakat pada pemilihan wali nagari cukup rendah padahal ini adalah pemilihan wali nagari pertama secara langsung di nagari yang diadakan di nagari Koto Laweh ini

Penelitian ini menggunakan teori perilaku memilih (*voting behavior*) dengan menggunakan variabel orientasi kandidat dari mazhab psikologis dan afiliasi etnik dari mazhab sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe eksplanatori dan desain cross sectional. Data dikumpulkan menggunakan kuisioner dengan teknik wawancara langsung dengan responden (*face to face interview*). Unit analisis data adalah individu dengan tingkat analisis mikro. Untuk analisa data menggunakan program komputer SPSS 15.0 dan uji hipotesisnya menggunakan teknik spearman rank yang disajikan dengan data numerik yaitu tabel frekuensi dan tabulasi silang supaya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

Dari penelitian ini diketahui bahwa variabel orientasi kandidat adalah variable yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya kabupaten Solok pada Pemilihan wali nagari tahun 2007 dengan korelasi sebesar 0,534. Sedangkan variabel lainnya, afiliasi etnik tidak mempengaruhi perilaku memilih masyarakat tersebut.

Kata Kunci: Perilaku memilih, variabel afiliasi etnik, orientasi kandidat, Pemilihan Wali Nagari Langsung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari wilayah-wilayah yang daerahnya mempunyai pemerintahan baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif. Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah tersebut tetap harus memperhatikan masyarakat dalam sistem pemerintahan dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Mengenai pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945¹ berbunyi 'pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa'.

Dalam daerah kesatuan RI yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan Negara adalah pemerintahan pusat yang nantinya akan ada pendelegasian dan pelimpahan kekuasaan pada pemerintahan daerah. Pada awalnya tata pemerintahan Indonesia dimana segala urusan dan jalannya pemerintahan daerah dikuasai dan diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat, semenjak dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dimana masing-masing Provinsi melalui peraturan daerah diberi peluang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi dan

¹ Saharizal, *Reformasi Konstitusi 1998-2002, Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945*, Angrek Law Firm, Padang, 2002, hlm. 174.

kepentingan masyarakat termasuk menyusun unit pemerintahan terendah. Kemudian UU No 22 tahun 1999 ini direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004 yang dalam bab I ketentuan umum pasal 1 poin 12 yang didalamnya memuat tentang Desa, dimana disini dinyatakan bahwa " Desa atau yang disebut nama lain merupakan kesatuan hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara². Desa atau yang disebut nama lain yang merupakan sub sistem dari pemerintahan Republik Indonesia yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Pernyataan Undang-Undang diatas disambut baik oleh pemerintah khususnya Sumatera Barat dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 tentang pokok pemerintahan Nagari. Dalam bab I ketentuan umum pasal 1 menyatakan bahwa " Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat". Nagari dipimpin oleh

² UU No 32 Tahun 2004 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 12.

seorang Wali Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat dengan masa jabatan 6 tahun³.

Berdasarkan sistem pemerintahan di alam Minangkabau yang berlaku sejak zaman dahulu, Nagari adalah wilayah administrasi terendah, dan sesudah Indonesia merdeka, hal ini kemudian di adaptasi oleh Pemerintah sehingga untuk wilayah propinsi Sumatera Barat, struktur wilayah administrasi secara berurut dari tingkat yang paling tinggi adalah Propinsi > Kabupaten > Kecamatan > Nagari. Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, Wali Nagari dibantu oleh beberapa orang Kepala Jorong, semacam Ketua RT. Wali Nagari dipilih oleh *anak Nagari* (penduduk Nagari) secara demokratis. Dan biasanya yang dipilih menjadi Wali Nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga Wali Nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak Nagari. Wali Nagari bebas mengambil kebijaksanaan demi kemajuan Nagarinya, namun tentu saja kebijaksanaan Wali Nagari tidaklah bisa dilakukan secara otoriter karena ada Kerapatan Adat Nagari, suatu Badan Legislatif sekaligus Yudikatif yang beranggotakan Tungku Tigo Sajarangan.⁴ Tungku Tigo Sajarangan adalah semacam perwakilan anak Nagari yang terdiri dari Alim Ulama, Cadiak Pandai (Kaum Intelektual) dan Niniak Mamak para pemimpin suku dalam suatu Nagari. Keputusan keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara Wali Nagari dan Tungku Tigo Sajarangan di Balai Adat atau Balairung Sari Nagari.

³ PERDA Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 tentang pokok pemerintahan Nagari

⁴ <http://www.solok.go.id/html/selayangpandang.html>

BAB VII

KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang perilaku memilih masyarakat Nagari Koto Laweh kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, dimana penggunaan hak pilih oleh masyarakat yang wajib pilih cukup rendah pada pemilihan Wali Nagari tahun 2007, hal ini menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti perilaku memilih masyarakat Nagari Koto Laweh, kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok dengan menggunakan dua variabel, yaitu afiliasi etnik dan orientasi kandidat. Pada penelitian ini menggunakan teori perilaku memilih dengan mengacu pada mazhab psikologi dimana mengatakan bahwa penentuan pilihan politik seseorang sangat ditentukan oleh pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam diri seseorang sebagai produk sosialisasi dan mazhab sosiologi dimana menurut pendekatan ini, masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosial seperti agama, etnik, pekerjaan, umur, jenis kelamin pendidikan dan sebagainya yang memiliki peranan yang cukup menentukan dalam perilaku memilih. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian explanatory.

Penelitian ini dilatar belakangi karena pada pemilihan Wali Nagari yang terjadi di Nagari Koto Laweh pada tahun 2007, jumlah pemilih yang menggunakan hak pada pemilihan Nagari cukup rendah, padahal pemilihan Wali Nagari yang berlangsung pada tahun 2007 ini adalah pemilihan Wali Nagari pertama dengan

menggunakan system pemilihan Wali nagai secara langsung, dimana masyarakat memilih Wali Nagari secara langsung keinginan mereka. Melatarbelakangi hal tersebut peneliti tertarik meneliti pengaruh orientasi kandidat dan afiliasi etnik terhadap perilaku memilih masyarakat.

Berdasarkan penjelasan bab terdahulu, baik dalam kerangka teoritis, pendeskripsian, uji korelasi spearman rank maka dapat disimpulkan bahwa orientasi kandidat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat walaupun dengan korelasi yang cukup kuat. Selain itu juga diketahui bahwa afiliasi etnik tidak mempengaruhi perilaku memilih masyarakat. Dari keadaan diatas diketahui bahwa masyarakat bersifat rasional dengan menempatkan alasan yang lebih berkaitan dengan orientasinya terhadap kandidat dari pada hubungan yang bersifat afiliasi etnik.

Orientasi terhadap kandidat yang berupa pengetahuan responden tentang segala yang berhubungan dengan visi dan misi, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, agama, pengalaman memimpin dan ketertarikan pemilih terhadap kandidat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Nagari Koto Laweh dengan koefisien korelasi atau nilai r adalah 0.534, menunjukkan korelasi yang lemah karena terletak antara interval nilai r 0.400-0.600. Sedangkan variabel afiliasi etnik tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih masyarakat Nagari Koto Laweh, dengan koefisien korelasi atau nilai r adalah 0.134, sehingga afiliasi etnik tidak mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Nagari Koto Laweh



DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi dan Jurnal

- Asrinaldi, A, 2003. "*Generasi Muda dan Peran Strategisnya dalam Pemilu 2004*", Jurnal Analisa Politik
- Huntington, Samuel P. & Joan M. Nelson, 1994, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta
- Kavanagh, Dennis, 1982, *Kebudayaan Politik*, Jakarta: PT. Bina Aksara lenggang. Masrial
- Nursal, Adnan, 2004, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suharizal, 2002, *Reformasi Konstitusi 1998-2002, Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945*, Anggrek Law Firm, Padang

Buku Metodologi

- Bungin, Burhan, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana, Jakarta
- Prasetyo, Bambang, dan Lina Miflahul Jannah, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Singarimbun, Masri, Ed, 1982, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES
- Sugianto dkk. *Teknik Sampling*, Jakarta PT :Gramedia Pustaka Utama

Skripsi dan Laporan Penelitian

- Hendrik, Doni 2003, *Perilaku Memilih Etnis China Pada Pemilu 1999 Di Kota Padang*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang.
- Kristiadi, Josep, 1994, *Pemilihan Umum dan Perilaku Memilih : Suatu Studi Kasus Tentang Perilaku Memilih Kotamadya Yogyakarta Dan Kabupaten Banjar Negara, Jawa Tengah Pada Pemilihan umum 1971-1987*, Disertasi, Universitas Gajah Mada Yogyakarta